



KEPUTUSAN
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 11/KEP/KIP/XII/2025

TENTANG
HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna mengetahui pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik;
- b. bahwa Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah selesai dilaksanakan dan dihasilkan kualifikasi yang menjadi tolok ukur pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Informasi Pusat tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia 2021 NOMOR 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
4. Keputusan Komisi Informasi Nomor 06/KEP/KIP/VIII/2025 tentang Petunjuk Umum Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT TENTANG HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2025, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip terukur, obyektif, akuntabel, partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.

KEDUA : Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari tujuh kategori Badan Publik yang telah dikualifikasikan berdasarkan tolok ukur yang dihasilkan dari setiap tahapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

KETIGA : Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU telah ditetapkan 7 (tujuh) Badan Publik terbaik nasional sebagaimana termuat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

- KEEMPAT : Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU telah ditetapkan penghargaan secara khusus kepada 6 (enam) Badan Publik sebagaimana termuat dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.
- KELIMA : Keputusan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik merupakan kewenangan Komisi Informasi Pusat dan tidak dapat diganggu gugat.
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2025
KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT,

DONNY YOESGIANTORO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 11/KEP/KIP/XII/2025
TENTANG
HASIL MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2025

**HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2025**

1. Informatif

KEMENTERIAN		
NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI
1.	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	98.79
2.	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	98.57
3.	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	98.54
4.	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	98.42
5.	KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	98.40
6.	KEMENTERIAN PERTANIAN	98.33
7.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	98.29
8.	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	98.03
9.	KEMENTERIAN KOPERASI	98.01
10.	KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	97.96
11.	KEMENTERIAN KEUANGAN	97.80
12.	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	97.13
13.	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	96.97
14.	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	96.50
15.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	96.13
16.	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	96.05
17.	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL	95.97
18.	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	95.83
19.	KEMENTERIAN PERTAHANAN	95.80

20.	KEMENTERIAN HUKUM	95.79
21.	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	95.73
22.	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	95.59
23.	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	95.47
24.	KEMENTERIAN KESEHATAN	95.37
25.	KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF/BADAN EKONOMI KREATIF	95.08
26.	KEMENTERIAN PARIWISATA	94.89
27.	KEMENTERIAN AGAMA	94.62
28.	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	94.39
29.	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	94.12
30.	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	93.50
31.	KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	93.01
32.	KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	91.81
33.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	91.56

LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	98.90
2.	OTORITAS JASA KEUANGAN	98.70
3.	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	98.61
4.	KEJAKSAAN AGUNG RI	98.50
5.	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	98.49
6.	BANK INDONESIA	98.40
7.	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	98.34
8.	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	98.32
9.	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	98.11
10.	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	97.99
11.	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	97.96
12.	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	97.93
13.	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN	97.75
14.	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	97.61
15.	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	97.61
16.	BADAN PUSAT STATISTIK	97.55
17.	PERPUSTAKAAN NASIONAL	97.50

18.	KOMISI YUDISIAL	97.44
19.	MAHKAMAH AGUNG	97.43
20.	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	97.40
21.	RADIO REPUBLIK INDONESIA	97.35
22.	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN	97.00
23.	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	96.87
24.	MAHKAMAH KONSTITUSI	96.85
25.	BADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	96.85
26.	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	96.67
27.	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	96.40
28.	BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	95.99
29.	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	95.85
30.	BADAN GIZI NASIONAL	95.81
31.	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	95.60
32.	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	95.53
33.	LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN	94.91
34.	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	93.35
35.	BADAN PANGAN NASIONAL	91.24

LEMBAGA NON STRUKTURAL		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	KOMISI PEMILIHAN UMUM	97.84
2.	BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL	97.70
3.	KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI	97.07
4.	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	96.90
5.	BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI	96.23
6.	KOMISI PENYIARAN INDONESIA	94.61
7.	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	94.50
8.	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	94.31
9.	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	93.41
10.	LEMBAGA SENSOR FILM	91.43
11.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI	91.24

PEMERINTAH PROVINSI		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA	99.45
2.	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR	98.72
3.	PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT	98.17

4.	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH	98.07
5.	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	97.25
6.	PEMERINTAH ACEH	97.06
7.	PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	96.47
8.	PEMERINTAH PROVINSI BANTEN	96.45
9.	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	96.11
10.	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	95.58
11.	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	94.91
12.	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	94.25
13.	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	94.19
14.	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	93.36
15.	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	93.30
16.	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	93.27
17.	PEMERINTAH PROVINSI BALI	93.11
18.	PEMERINTAH PROVINSI JAMBI	92.41
19.	PEMERINTAH PROVINSI MALUKU	92.10
20.	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	92.07
21.	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN	90.35

BADAN USAHA MILIK NEGARA		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)	99.19
2.	PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)	99.02
3.	PT JASA MARGA (PERSERO) TBK	98.92
4.	PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA (PERSERO)	98.81
5.	PT PERTAMINA (PERSERO)	98.67
6.	PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK	98.64
7.	PT TASPEN (PERSERO)	98.61
8.	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	98.47
9.	PERUM BULOG	98.45
10.	PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK	98.33
11.	PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)	98.29
12.	PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	98.15
13.	PERUM JASA TIRTA II	98.11
14.	PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)	98.10
15.	PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)	98.06
16.	PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)	97.97
17.	PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)	97.91
18.	PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK	97.79
19.	PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)	97.71

20.	PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK	97.67
21.	PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA	97.67
22.	PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK	97.55
23.	PT HUTAMA KARYA (PERSERO)	97.38
24.	PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK	97.37
25.	PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)	97.20
26.	PT ASABRI (PERSERO)	97.07
27.	PERUM PERUMNAS	96.86
28.	PT BIO FARMA (PERSERO)	96.76
29.	PERUM JASA TIRTA I	96.70
30.	PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK	96.69
31.	PERUM LPPNPI	96.43
32.	PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK	96.43
33.	PT DANAREKSA (PERSERO)	96.20
34.	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	95.67
35.	PERUM LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA	95.12
36.	PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)	94.92
37.	PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK	94.79
38.	PERUM DAMRI	92.05
39.	PT POS INDONESIA (PERSERO)	90.95

PERGURUAN TINGGI NEGERI		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	98.87
2.	UNIVERSITAS GADJAH MADA	98.69
3.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG	98.32
4.	UNIVERSITAS NEGERI MALANG	98.09
5.	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	97.90
6.	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	97.90
7.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG	97.82
8.	UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA	97.75
9.	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA	97.75
10.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI	97.28
11.	UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN	97.26
12.	UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG	97.21
13.	UNIVERSITAS AIRLANGGA	97.17
14.	UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG	96.99
15.	UNIVERSITAS PADJADJARAN	96.95
16.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	96.85
17.	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	96.70

18.	INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN	96.67
19.	UNIVERSITAS RIAU	96.52
20.	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	96.44
21.	UNIVERSITAS TERBUKA	96.43
22.	UNIVERSITAS SEBELAS MARET	96.40
23.	UNIVERSITAS NEGERI PADANG	96.37
24.	UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA	95.68
25.	UNIVERSITAS ANDALAS	95.66
26.	UNIVERSITAS UDAYANA	95.65
27.	UNIVERSITAS SYIAH KUALA	95.64
28.	UNIVERSITAS JEMBER	95.57
29.	INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG	95.51
30.	UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA	95.33
31.	UNIVERSITAS SILIWANGI	95.11
32.	INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER	95.04
33.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG	94.95
34.	INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG	94.84
35.	UNIVERSITAS LAMPUNG	94.62
36.	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	94.55
37.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR	94.38
38.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG	94.24
39.	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	94.01
40.	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE-PARE	93.39
41.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA	93.23
42.	UNIVERSITAS MATARAM	93.18
43.	UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO	92.73
44.	UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR	92.69
45.	UNIVERSITAS INDONESIA	92.63
46.	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN YOGYAKARTA	92.53
47.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG	91.94
48.	UNIVERSITAS HASANUDDIN	91.71
49.	UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA	91.26
50.	UNIVERSITAS TANJUNGPURA	91.20
51.	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI DATUK LAKSEMANA BENGKALIS	91.15
52.	UNIVERSITAS TADULAKO	90.97
53.	UNIVERSITAS TIDAR	90.85
54.	UNIVERSITAS NEGERI MEDAN	90.42

PARTAI POLITIK		
NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	98.56
2.	PARTAI DEMOKRAT	97.81
3.	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	95.65
4.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	90.48

2. Menuju Informatif

KEMENTERIAN		
NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI
1.	KEMENTERIAN KEHUTANAN	89.37
2.	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	88.59
3.	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	88.17
4.	KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	84.41
5.	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	82.45

LEMBAGA NON STRUKTURAL		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL	80.91

PEMERINTAH PROVINSI		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA	89.47
2.	PEMERINTAH PROVINSI RIAU	89.21
3.	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG	88.74
4.	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	87.58
5.	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA	86.97

BADAN USAHA MILIK NEGARA		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)	89.05
2.	PERUM PERHUTANI	87.57

PERGURUAN TINGGI NEGERI		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER	89.89
2.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH	89.60
3.	UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA	87.63
4.	INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR	85.67
5.	SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA	85.40
6.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA	84.01
7.	INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA	81.67

PARTAI POLITIK		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	83.61

3. Cukup Informatif

KEMENTERIAN		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	77.91

LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	78.85
2.	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	78.76
3.	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	77.15
4.	BADAN INTELIJEN NEGARA	60.24

LEMBAGA NON STRUKTURAL		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	78.59

PEMERINTAH PROVINSI		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU	77.87
2.	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA	76.81

3.	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT	64.12
----	------------------------------------	-------

BADAN USAHA MILIK NEGARA		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PT BARATA INDONESIA (PERSERO)	71.72

PERGURUAN TINGGI NEGERI		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA	78.56
2.	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	76.43

PARTAI POLITIK		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PARTAI AMANAT NASIONAL	73.63
2.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	62.68

4. Kurang Informatif

KEMENTERIAN		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	KEMENTERIAN SOSIAL	51.56
2.	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	50.52
3.	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN	43.36

LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA	49.56
2.	BADAN KARANTINA INDONESIA	45.64

LEMBAGA NON STRUKTURAL		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	59.4
2.	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	41.64

PEMERINTAH PROVINSI		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	50.68
2.	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	46.6

3.	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT	45.04
----	---------------------------------	-------

BADAN USAHA MILIK NEGARA		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)	59.24
2.	PT LEN INDUSTRI (PERSERO)	56.84
3.	PT INDUSTRI KERETA API (PERSERO)	52.88
4.	PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (PERSERO)	51.88
5.	PERUM PERCETAKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	48.80

PERGURUAN TINGGI NEGERI		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM	59.60
2.	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG	59.48
3.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KUDUS	58.04
4.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN	57.80
5.	INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG	57.44
6.	UNIVERSITAS DIPONEGORO	56.24
7.	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE	56.12
8.	INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA	54.84
9.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG	54.68
10.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	53.84
11.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN	52.08
12.	INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM	49.56
13.	UNIVERSITAS JAMBI	49.32
14.	UNIVERSITAS NUSA CENDANA	49.04
15.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN	45.40
16.	SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA	44.40
17.	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK	40.48
18.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO	40.32

PARTAI POLITIK		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PARTAI NASDEM	58.85

5. Tidak Informatif

KEMENTERIAN		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA	38.40
2.	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	34.76
3.	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN	6.04
4.	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1.00
5.	KEMENTERIAN HAJI DAN UMROH	0.00
6.	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN	0.00

LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	35.52
2.	TENTARA NASIONAL INDONESIA	23.36
3.	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA	15.76
4.	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL	6.60
5.	BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA (DANANTARA)	0.00

LEMBAGA NON STRUKTURAL		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	39.96
2.	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	29.48
3.	KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	27.96
4.	KOMISI KEJAKSAAN RI	14.76
5.	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	2.72
6.	KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH	1.00
7.	DEWAN PERS	0.80
8.	BADAN PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN	0.00
9.	AKADEMISI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	0.00
10.	BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL	0.00
11.	DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL	0.00
12.	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	0.00
13.	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	0.00
14.	DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	0.00

	NASIONAL	
15.	KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA	0.00
16.	KOMITE AKREDITASI NASIONAL	0.00
17.	BADAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN INVESTIGASI KHUSUS	0.00
18.	DEWAN EKONOMI NASIONAL	0.00
19.	DEWAN ENERGI NASIONAL	0.00
20.	BADAN INTELIJEN KEUANGAN	0.00

PEMERINTAH PROVINSI		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO	11.96
2.	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH	0.00
3.	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	0.00
4.	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN	0.00
5.	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN	0.00
6.	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA	0.00

BADAN USAHA MILIK NEGARA		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PT INDUSTRI KAPAL INDONESIA (PERSERO)	35.60
2.	PT PRODUKSI FILM NEGARA (PERSERO)	19.96
3.	PT DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA (PERSERO)	9.52
4.	PT DOK DAN PERKAPALAN KODJA BAHARI (PERSERO)	6.20
5.	PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)	3.88
6.	PT DJAKARTA LLOYD (PERSERO)	3.20
7.	PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)	0.00
8.	INDAH KARYA (PERSERO)	0.00
9.	AMARTA KARYA (PERSERO)	0.00
10.	BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)	0.00
11.	AGRINAS PALMA NUSANTARA (PERSERO)	0.00
12.	PDI PULAU BATAM (PERSERO)	0.00
13.	PRIMISSIMA (PERSERO)	0.00
14.	SEMEN KUPANG (PERSERO)	0.00
15.	VIRAMA KARYA (PERSERO)	0.00
16.	AGRINAS PANGAN NUSANTARA (PERSERO)	0.00

PERGURUAN TINGGI NEGERI		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	39.20

2	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO	33.88
3	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI	33.16
4	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TORAJA	32.04
5	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	31.92
6	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA	28.44
7	UNIVERSITAS NEGERI MANADO	27.96
8	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO	27.72
9	UNIVERSITAS SAMUDRA	26.96
10	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN	25.64
11	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG	25.44
12	UNIVERSITAS TIMOR	25.20
13	SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN PROTESTAN NEGERI SENTANI	23.96
14	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON	20.16
15	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO	18.24
16	UNIVERSITAS SEMBILAN BELAS NOVEMBER KOLAKA	17.08
17	UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA	13.72
18	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU	3.76
19	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU	2.80
20	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA	2.20
21	UNIVERSITAS NEGERI PAPUA	1.20
22	SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI MPU KUTURAN SINGARAJA	0.00
23	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL	0.00
24	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TENGKU DIRUNDENG	0.00
25	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON	0.00
26	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP	0.00
27	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATTAHUL MULUK JAYAPURA	0.00
28	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	0.00
29	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO	0.00
30	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO	0.00
31	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG	0.00
32	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE	0.00
33	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA	0.00

34	UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA	0.00
35	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN	0.00
36	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN	0.00
37	UNIVERSITAS PALANGKARAYA	0.00
38	UNIVERSITAS SAM RATULANGI	0.00
39	INSTITUT TEKNOLOGI BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE	0.00
40	INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA	0.00
41	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI	0.00
42	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	0.00
43	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MALIKUSSALEH LHOKSEUMAWE	0.00
44	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK	0.00
45	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TAKENGON	0.00
46	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA	0.00
47	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG	0.00
48	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA	0.00
49	INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA TANAH PAPUA	0.00
50	INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA	0.00
51	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE	0.00
52	UNIVERSITAS BENGKULU	0.00
53	UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN	0.00
54	UNIVERSITAS CENDRAWASIH	0.00
55	UNIVERSITAS HALUOLEO	0.00
56	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR	0.00
57	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU	0.00
58	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI	0.00
59	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL	0.00
60	UNIVERSITAS KHAIRUN	0.00
61	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT	0.00
62	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	0.00
63	UNIVERSITAS MULAWARMAN	0.00
64	UNIVERSITAS MUSAMUS	0.00
65	UNIVERSITAS PATTIMURA	0.00
66	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR	0.00
67	UNIVERSITAS SULAWESI BARAT	0.00
68	UNIVERSITAS TEUKU UMAR	0.00

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 11/KEP/KIP/XII/2025
TENTANG
HASIL MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2025

**TERBAIK NASIONAL
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025
ARKAYA WIWATA PRAJANUGRAHA**

- ❖ PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
- ❖ PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
- ❖ KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- ❖ KEMENTERIAN PERDAGANGAN
- ❖ OTORITAS JASA KEUANGAN
- ❖ KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
- ❖ PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 11/KEP/KIP/XII/2025
TENTANG
HASIL MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2025

PENGHARGAAN KHUSUS
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

- ❖ KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
- ❖ BADAN GIZI NASIONAL
- ❖ KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF/BADAN EKONOMI KREATIF
- ❖ KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
- ❖ BADAN PANGAN NASIONAL
- ❖ BADAN INTELIGEN NEGARA